



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

EDISI 1



RENSTRA 2025-2029



DINAS KOMINFO LAMBAR



@KOMINFOLAMBAR



DISKOMINFO LAMBAR



PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan satuan kerja. Dokumen ini akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029, sehingga Renstra ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan rentang waktu lima tahunan.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak, atas keterlibatannya dalam menyelesaikan penyusunan dokumen Renstra ini, sebagai bahan acuan dalam penyusunan Renja Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, 18 September 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lampung Barat,



BURLIANTO EKA PUTRA, S.H.

Pembina Utama Muda

NIP 197109241998031005

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan sebagai pedoman penyusunan RKPD dan Renja Tahun 2025-2029.

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat 2025-2029 disusun berdasarkan kajian ahli dan masukan dari perangkat daerah, serta melibatkan banyak pihak. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, yang mencakup tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan lima tahun ke depan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat 2025–2029 disusun berpedoman pada RPJMD. Renstra ini memperkuat peran Diskominfo dalam pengelolaan Bidang komunikasi

dan Informatika, Statistik dan Persandian yang profesional untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Dengan Visi **“Mewujudkan Lampung Barat yang Harmonis, Elok, Berbudaya, Agamis, Taqwa, Sehat Cerdas Berbudaya, Tegas, Inovatif, Adil Makmur dan merata (LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SETIA)”**. Mendukung Misi 3 : **“Mewujudkan Birokasi yang amanah, menjunjung tinggi hukum dan berkeadaban”** Indikator keberhasilannya adalah **Indeks Reformasi Birokrasi** dan **Indeks Daya Saing Daerah**.

Renstra Diskominfo disusun berdasarkan evaluasi kegiatan tahun 2023–2025, untuk memastikan kesinambungan dan integrasi dalam pengelolaan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik daerah. Penyusunan dilakukan secara sistematis dan analitis dengan melibatkan semua potensi dan permasalahan pembangunan. Dalam penyusunan Renstra Diskominfo Kabupaten Lampung Barat dilaksanakan melalui pendekatan holistik yang mampu merangkul segenap potensi dan permasalahan pembangunan, menuangkan dalam suatu analisis kebijakan pembangunan, dan pada akhirnya merumuskan perencanaan pembangunan 5 Tahunan.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang No 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Barat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2001 – 2004 yang

menegaskan Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Perencanaan dalam bentuk Program Pembangunan Daerah (Propeda);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Adapun Maksud penyusunan Rencana Startegis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat sebagai upaya perwujudan Tujuan dan Sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat :

- Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan bidang kepegawaian secara terukur;
- Menyediakan rujukan teknis bagi penyusunan rencana kerja tahunan, sebagai dasar masukan untuk penyusunan RKPD, KUA dan PPAS dengan menggunakan pendekatan kinerja yang terukur;
- Memudahkan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja yang terukur.

b. Tujuan

Rencana Startegis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat sebagai bentuk penjabaran dari pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan sekaligus sebagai sebuah dokumen perencanaan program dalam kurun waktu 2025 – 2029 serta merupakan pegangan umum dalam pelaksanaan teknis operasional yang diformulasikan dalam bentuk program aksi atau kegiatan dan subkegiatan mengacu pada tupoksi yang dalam pelaksanaannya

terkoordinasi dengan menyesuaikan kemampuan dana yang tersedia sesuai pada kondisi yang ada.

4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumberdaya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah. Serta beerisi Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas, Fungsi Pelayanan PD, Telaahan Tujuan dan Sasaran RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)/RPJMD 2023-2026, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHD serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi Rencana Program dan Kegiatan yang disertai Pendanaan untuk Tahun 2023-2026, serta berisi Kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

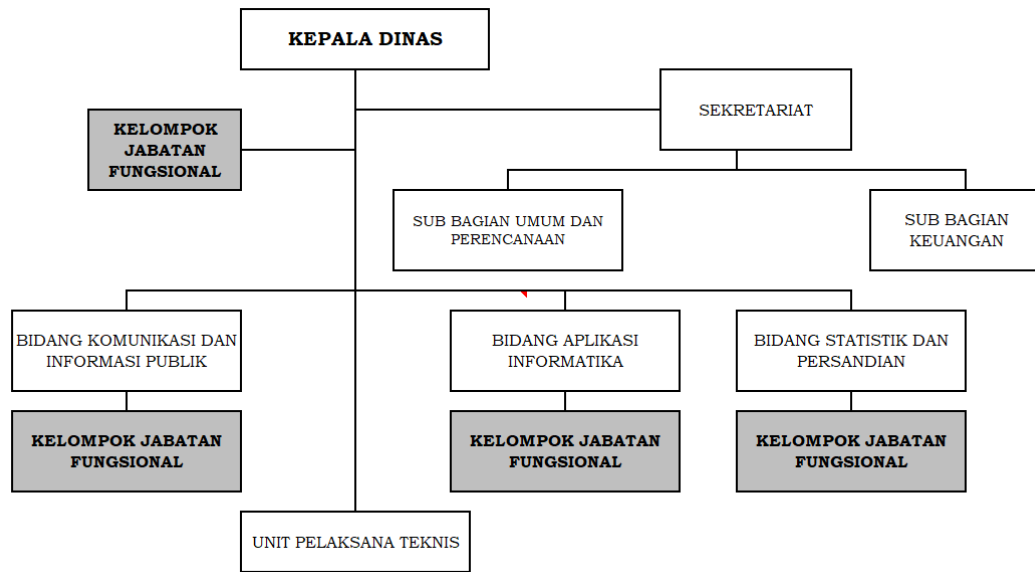
1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat dan sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok yaitu **“Melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Yang Menjadi Kewenangan Daerah”**. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika;
3. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Komunikasi dan Informatika; dan
5. Dan Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi di bawah ini:



b. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat periode 31 Desember 2023 sebanyak 28 orang. Profil demografi ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat di bawah ini :

Berdasarkan Tingkat Pendidikan, dari 28 orang PNS dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II-1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	Jumlah
1	Sarjana Strata 2	7 Orang
2	Sarjana	16 Orang
3	SMA	5 Orang

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2025

Berdasarkan Kepangkatan/Golongan, dari 28 Orang PNS tersebut dapat dilihat pada tabel sebagaimana tersebut di bawah ini :

Tabel II-2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama	IV/c	1 Orang

	Muda		
2	Pembina Tingkat I	IV/b	1 Orang
3	Pembina	IV/a	3 Orang
4	Penata Tingkat I	III/d	4 Orang
5	Penata	III/c	7 Orang
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	2 Orang
7	Penata Muda	III/a	6 Orang
8	Pengatur	II/d	3 Orang
9	Pengatur	II/c	-
10	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1 Orang
11	Pengatur Muda	II/a	-

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2025

Berdasarkan rumpun jabatan, dari 28 Orang PNS tersebut dapat dilihat pada tabel sebagaimana tersebut di bawah ini :

Tabel II-3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Rumpun Jawaban

No.	Rumpun Jabatan	Jumlah
1	Struktural	7
2	Fungsional Tertentu	9
3	Fungsional Umum	12
Jumlah		28

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2025

2. Sarana Prasarana

Data Sarana dan Prasarana yang masih terpakai (dapat dipergunakan) Adapun sarana pendukung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat yaitu :

Tabel II-4 Daftar Sarana dan Prasarana

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Absen Sidik Jari	1	Unit
2	Ac	4	Unit
3	Acces Poin Outdoor	5	Unit
4	Almari Arsip Besi	1	Unit
5	Amplifier + Hom Speaker	1	Unit
6	Antena	3	Unit
7	Antena Mobil	1	Unit
8	Antena Omni	1	Unit
9	Aplikasi Sip Online	1	Unit

10	Avr	2	Unit
11	Batere (Cadangan)	1	Unit
12	Baterey Hendycam	2	Unit
13	Beaket Antena Mobil	1	Unit
14	Bendera Lisplang	5	Unit
15	Betere Drone	1	Unit
16	Bilboard	1	Unit
17	Bracket Standing	2	Unit
18	Brankas	2	Unit
19	Breket Antena Manual Tower	1	Unit
20	Camera	1	Unit
21	Camera Mirroles	1	Unit
22	Capture	1	Unit
23	Cctv	3	Unit
24	Clip On	1	Unit
25	Conektor Rj 45	2	Unit
26	Design Web	1	Unit
27	Dlink Unmamageg Swicth	1	Unit
28	Drone	1	Unit
29	Dvd Player	1	Unit
30	Filling Kabinet	7	Unit
31	Generating Set	1	Unit
32	Genset	1	Unit
33	Genset Daimaru Dmh78005	1	Unit
34	Gordyn	1	Unit
35	Gps / Garmin	1	Unit
36	Hand Set	2	Unit
37	Handphone	1	Unit
38	Handy Talky	1	Unit
39	Hard Disk	1	Unit
40	Hardisk External	1	Unit
41	Headphone	1	Unit
42	Hordeng	17	Unit
43	Hp	1	Unit
44	Ht	5	Unit
45	Hub	3	Unit
46	Instalasi Jaringan Internet	1	Unit
47	Inverter	1	Unit
48	Jaringan Fiber Optik	1	Unit
49	Jaringan Internet Fiber Optic	1	Unit
50	Kabel Hdmi	9	Unit
51	Kabel Rg-8	1	Unit
52	Kabel Utp	2	Unit
53	Kamera	5	Unit
54	Kersi 1 Biro	1	Unit
55	Komputer	15	Unit
56	Komputer Main Frame/Server	1	Unit
57	Komputer Mainframe	1	Unit
58	Komputer Server	1	Unit

59	Kursi 1/2 Biro	3	Unit
60	Kursi Biro	1	Unit
61	Kursi Kerja R Sekretariat	1	Unit
62	Kursi Lipat	6	Unit
63	Kursi Putar	3	Unit
64	Kursi Tamu	2	Unit
65	Laptop	14	Unit
66	Layar Proyektor	1	Unit
67	Led/Infocus	3	Unit
68	Lemari	1	Unit
69	Lemari Arsip	3	Unit
70	Lemari Arsip Besi	1	Unit
71	Lensa Kamera	1	Unit
72	Lensa Kamera Slr	1	Unit
73	Lensa Tele	1	Unit
74	Mega Pon	1	Unit
75	Meja 1 Biro	3	Unit
76	Meja 1/2 Biro	4	Unit
77	Meja Biro	3	Unit
78	Meja Kaca Panjang	1	Unit
79	Meja Kerja	3	Unit
80	Meja Kerja R Fraksi	1	Unit
81	Meja Komputer	1	Unit
82	Meja Resepsionis	1	Unit
83	Mesin Fax	1	Unit
84	Mesin Tik	1	Unit
85	Mic Wirelles	2	Unit
86	Microphone	4	Unit
87	Minibus	1	Unit
88	Mixer	1	Unit
89	Mixer Soundcard	1	Unit
90	Mobile M-Mustika (Pick Up)	1	Unit
91	Modem	1	Unit
92	Momory Card	5	Unit
93	Monitor LED 19" (Server)	1	Unit
94	Obeng -	2	Unit
95	Obeng +	2	Unit
96	Obeng Taspen	2	Unit
97	Open Rack	1	Unit
98	Papan Data	1	Unit
99	Papan Struktur	1	Unit
100	Payung Tenda	1	Unit
101	Pemadam Kebakaran	1	Unit
102	Penghancur Kertas	1	Unit
103	Pesawat Right	1	Unit
104	Power Boster Pendorong	1	Unit
105	Power Suplay	5	Unit
106	Printer	15	Unit
107	Projektor/Infocus	1	Unit

108	Rack Server	1	Unit
109	Radio HT	1	Unit
110	Radio Portabel	1	Unit
111	Radio Righ	8	Unit
112	Rak Buku	1	Unit
113	Repeater	2	Unit
114	Router	1	Unit
115	Router Hap	1	Unit
116	Router Mikrotik Rb	5	Unit
117	Scanner	1	Unit
118	Screen LCD	1	Unit
119	Sepeda Motor	6	Unit
120	Sice	1	Unit
121	Smartphone	1	Unit
122	Sofa	1	Unit
123	Sofa Tamu	1	Unit
124	Software Manajemen Dan Security	1	Unit
125	Software Zimbra	1	Unit
126	Sound System	4	Unit
127	Speaker Aktip	1	Unit
128	Speker Baretone	1	Unit
129	Stabilizer	4	Unit
130	Switcher/Menara Antena	1	Unit
131	Tablet	1	Unit
132	Tang Potong	2	Unit
133	Tangga Telescopik	1	Unit
134	Tas Kamera	1	Unit
135	Televisi	1	Unit
136	Telpon Seluler	1	Unit
137	Termometer	1	Unit
138	Tiang Antena Super Stik	1	Unit
139	Tirai/Gorden	1	Unit
140	Tower Antena Komunikasi Kecamatan	3	Unit
141	Tower Antena Radio	6	Unit
142	Tower Besi Segi Tiga	1	Unit
143	Tower Internet Kecamatan	3	Unit
144	Tripod	4	Unit
145	TV (60 Inc)	5	Unit
146	Umbul-Umbul	25	Unit
147	Ups	2	Unit
148	Ups 3000w	1	Unit
149	UPS/STABILIZER Inferter Dc-Ac	1	Unit
150	Video Tron	1	Unit
151	Webcam	4	Unit
152	Wireles Access Poin	3	Unit
153	Wireless	2	Unit

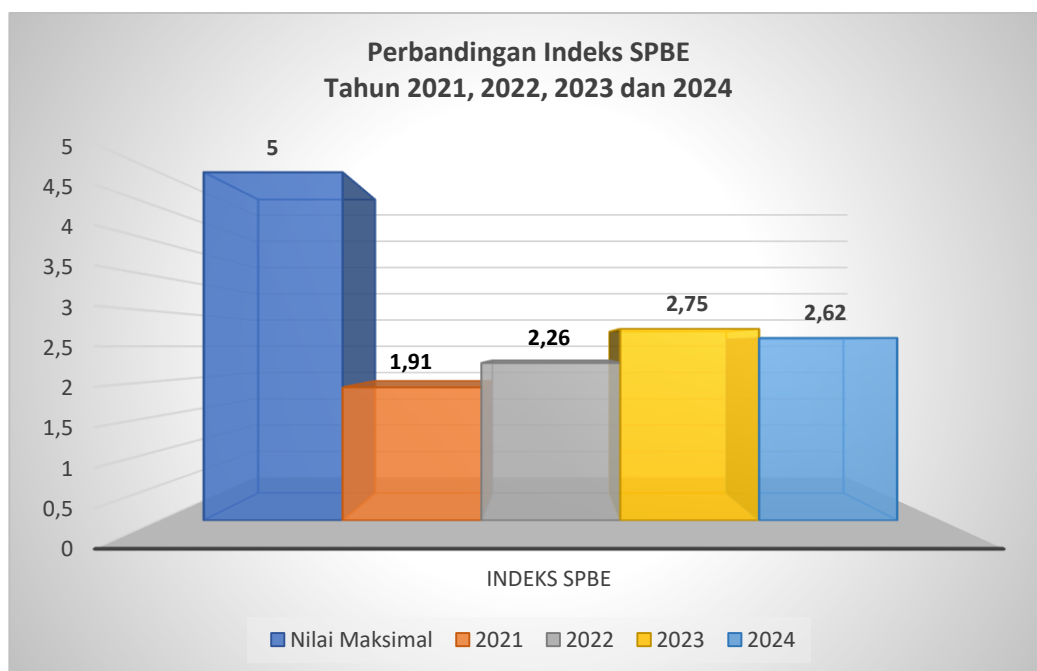
Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2023

Kondisi sarana pendukung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat sampai saat ini adalah :

1. Kendaraan Dinas Roda 4 : 4 Unit
2. Kendaraan Roda 2 : 5 Unit

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan kebijakan strategis nasional dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat secara bertahap telah mengimplementasikan SPBE, sebagaimana tercermin dari hasil evaluasi tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selama periode evaluasi 2021–2024, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mencatat peningkatan indeks SPBE sebagai berikut:



Secara umum, Diskominfo Kabupaten Lampung Barat menunjukkan kemajuan positif dengan kategori “Baik” dalam penyelenggaraan SPBE, khususnya dalam aspek kebijakan dan

layanan administrasi. Namun, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat aspek manajemen dan teknologi informasi, serta pelaksanaan audit TIK agar indeks SPBE dapat meningkat ke kategori "Sangat Baik" atau "Memuaskan".

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah mengalami peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan statistik sektoral:



Capaian positif tahun 2024 antara lain:

- Peningkatan kualitas data di semua aspek (Relevansi, Akurasi, Aksesibilitas, dan Konsistensi) mencapai nilai 3,00.
- Proses Bisnis Statistik telah terstandarisasi dan mendapat nilai tinggi (3,00).
- Profesionalitas dan pengorganisasian statistik mulai terstruktur melalui kebijakan dan SOP yang berlaku.

d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan

Di tengah capaian tersebut, beberapa tantangan utama yang masih dihadapi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah:

a. Minimnya interoperabilitas antar sistem

Sistem aplikasi masih berdiri sendiri tanpa keterhubungan melalui API/web service.

b. **Rendahnya kompetensi digital ASN**

ASN belum mengikuti pelatihan teknis, literasi, dan kepemimpinan digital secara menyeluruh.

c. **Ketiadaan siklus pembangunan aplikasi standar**

Aplikasi belum dikembangkan dengan pendekatan SDLC atau agile.

d. **Belum pernah dilakukan audit TIK**

Keamanan aplikasi dan infrastruktur belum pernah diuji secara berkala.

e. **Pemanfaatan sistem nasional belum optimal**

Identitas digital (IKD), Satu Data, dan Pusat Data Nasional belum diintegrasikan dalam sistem lokal.

2. Peluang

Dalam upaya meningkatkan kualitas penerapan Pemerintahan Digital, Kabupaten Lampung Barat memiliki sejumlah peluang strategis, antara lain:

a. **Adanya Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2022**

Dokumen ini mendasari kebijakan transformasi digital daerah.

b. **Pemanfaatan aplikasi nasional**

Kabupaten telah menggunakan platform seperti SIPD, Srikandi, SIASN, dan e-Kinerja.

c. **Dukungan kolaboratif dari lembaga pusat**

BSSN, Kominfo, BPS, dan Bappenas bersedia memberi pendampingan teknis.

d. **Transformasi digital sebagai prioritas nasional**

Adanya arah kebijakan RPJMN, SPBE Nasional, dan Indeks Pemerintah Digital mendorong percepatan daerah.

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam implementasi SPBE adalah:

1. Dokumen SPBE Belum Lengkap:

Arsitektur dan peta rencana SPBE belum mencakup aspek layanan, keamanan, data, dan manajemen risiko.

2. Siklus Pembangunan Aplikasi Belum Diterapkan

Pembangunan aplikasi belum mengikuti metodologi standar seperti SDLC atau *agile*, dan tidak terdokumentasi secara sistematis.

3. Sistem Belum Terinteroperabilitas

Tidak adanya integrasi data melalui API atau web service antar sistem internal maupun eksternal.

4. Kelemahan Pengelolaan Metadata Statistik

Metadata sektoral belum terdokumentasi dengan format standar nasional.

5. Portal Satu Data Tidak Optimal

Fungsi portal data daerah belum mendukung integrasi dan pertukaran data lintas sektor secara otomatis.

6. Tidak Tersedianya Audit Keamanan TIK

Belum pernah dilakukan audit terhadap keamanan aplikasi, infrastruktur, dan data digital secara menyeluruh.

b. Isu Strategis

Dalam rangka mendorong percepatan transformasi digital dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, terdapat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu:

1. Transformasi Digital Berbasis Silo

Digitalisasi masih terbatas di unit tertentu tanpa koordinasi lintas sektor.

2. Keamanan Siber Lemah

Belum terbentuk CSIRT dan belum diterapkan perlindungan data pribadi sesuai standar.

3. Kurangnya Inovasi dan Kolaborasi

Tidak ada forum inovasi digital lintas sektor atau kerja sama dengan pihak luar seperti perguruan tinggi dan swasta.

4. Kompetensi ASN Belum Siap Digitalisasi

ASN belum dibekali keterampilan literasi dan kepemimpinan digital secara sistematis.

5. Lemahnya Kelembagaan Statistik Daerah

Perlu peningkatan dan penguatan koordinasi dan struktur formal seperti tim teknis *Walidata* dan Forum Satu Data agar peran koordinatif lebih efektif.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai visi dan misi RPJMD Kabupaten Lampung Barat 2025 - 2029 oleh Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai 5 (lima) tahun ke depan, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya yang diformulasikan ke dalam tujuan strategis dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Dalam perumusan tujuan strategis juga memungkinkan organisasi untuk mengukur sejauh mana visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah dicapai. Untuk itu, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur sehingga apa yang menjadi cita-cita Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025 - 2029 dapat terwujud.

Dalam mendukung tercapainya Tujuan RPJMD Kabupaten Lampung Barat 2025 - 2029 yaitu **“Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan”**, dengan Sasaran **“Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan”** maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat mendukung dengan Tujuan Rencana Strategis yaitu **“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital”**.

Sasaran RPJMD	Tujuan	Indikator	Target Kinerja Tujuan pada Tahun ke-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital	Indeks Pemdi (Pemerintahan Digital)	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55

2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka harus mempunyai sasaran, adapun sasaran harus sesuai Indikator Utamanya. Sasaran jangka menengah Diskominfo sesuai dengan tujuan tersebut adalah **“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital”**.

Sedangkan rencana target pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dengan target sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis digital	Indeks Pemdi (Pemerintahan Digital)	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55

3. Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan suatu langkah dalam rangka memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun yang ditetapkan serta berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Strategi juga menjadi langkah - langkah yang berisikan program yang bersifat indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Adapun Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat yang perlu dilakukan dalam upaya penguatan indeks SPBE daerah adalah :

Berikut strategi utama yang akan dilaksanakan untuk mendorong transformasi digital:

1. Keamanan Siber

- Pembentukan CSIRT Daerah.
- Audit keamanan berkala terhadap sistem.
- Penerapan kriptografi nasional.

2. Kapabilitas dan Budaya Digital ASN

- Pelatihan literasi dan kepemimpinan digital.
- Penunjukan agen transformasi digital di setiap perangkat daerah.

3. Pengelolaan Data dan *Interoperabilitas*

- Implementasi API dan *web service* antar sistem.
- Penguatan *metadata* statistik dan walidata.
- Pemanfaatan *big data* dan data terbuka.

4. Layanan Digital Terpadu

- Layanan berbasis siklus hidup.
- Integrasi ke portal nasional pelayanan publik.
- Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

5. Kepuasan Pengguna

- Survei pengguna layanan digital.
- *Redesign* layanan berbasis *feedback* pengguna.

6. Perencanaan dan Tata Kelola

- Revisi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE.
- Integrasi dengan RPJMD dan Renstra Nasional.

7. Teknologi dan Infrastruktur Digital

- Penerapan SDLC/*agile* dalam pengembangan aplikasi.
- Migrasi ke Pusat Data Nasional.
- Penguatan jaringan dan perangkat.

8. Audit dan Evaluasi Digital

- Audit menyeluruh atas aplikasi, data, dan infrastruktur.
- Tindak lanjut hasil audit.

9. Inovasi dan Kolaborasi Digital

- Pembentukan forum kolaborasi digital daerah.
- Kemitraan dengan kampus dan *startup*.

4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya juga merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau

petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Adapun kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai 5 (Lima) Tahun ke depan adalah :

- **Mewujudkan Pemerintah Digital Terintegrasi dan Andal**, dengan fondasi pada keamanan, data, dan layanan.
- **Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi Pemerintahan**, melalui digitalisasi proses layanan dan akuntabilitas berbasis data.
- **Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Layanan Digital**, dengan platform yang inklusif dan mudah diakses.
- **Menyesuaikan Transformasi Digital Daerah dengan Arah Nasional**, berdasarkan RPJMN 2025–2029, SPBE Nasional, dan Indeks Pemdi.
- **Membangun Ekosistem Digital yang Kolaboratif**, antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
- PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
- PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI
- PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
- PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

2. Uraian Kegiatan

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. Uraian Sub Kegiatan

Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Saran Renstra	Outcome	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital			Indeks Pemdi	
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis digital		Indeks Pemdi	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Indeks KIP	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks Pemdi	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI
					Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
					Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Indeks KAMI	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
					Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2030 Melalui IKU

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis digital	Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi)	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55

5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah 2025-2030 Melalui IKK

No.	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase	40%	45%	50%	55%	60%	65%
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi	Persentase	40%	45%	50%	55%	60%	65%
3.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	80%	85%	90%	95%	100%	100%
4.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persentase	40%	45%	50%	55%	60%	65%

BAB V

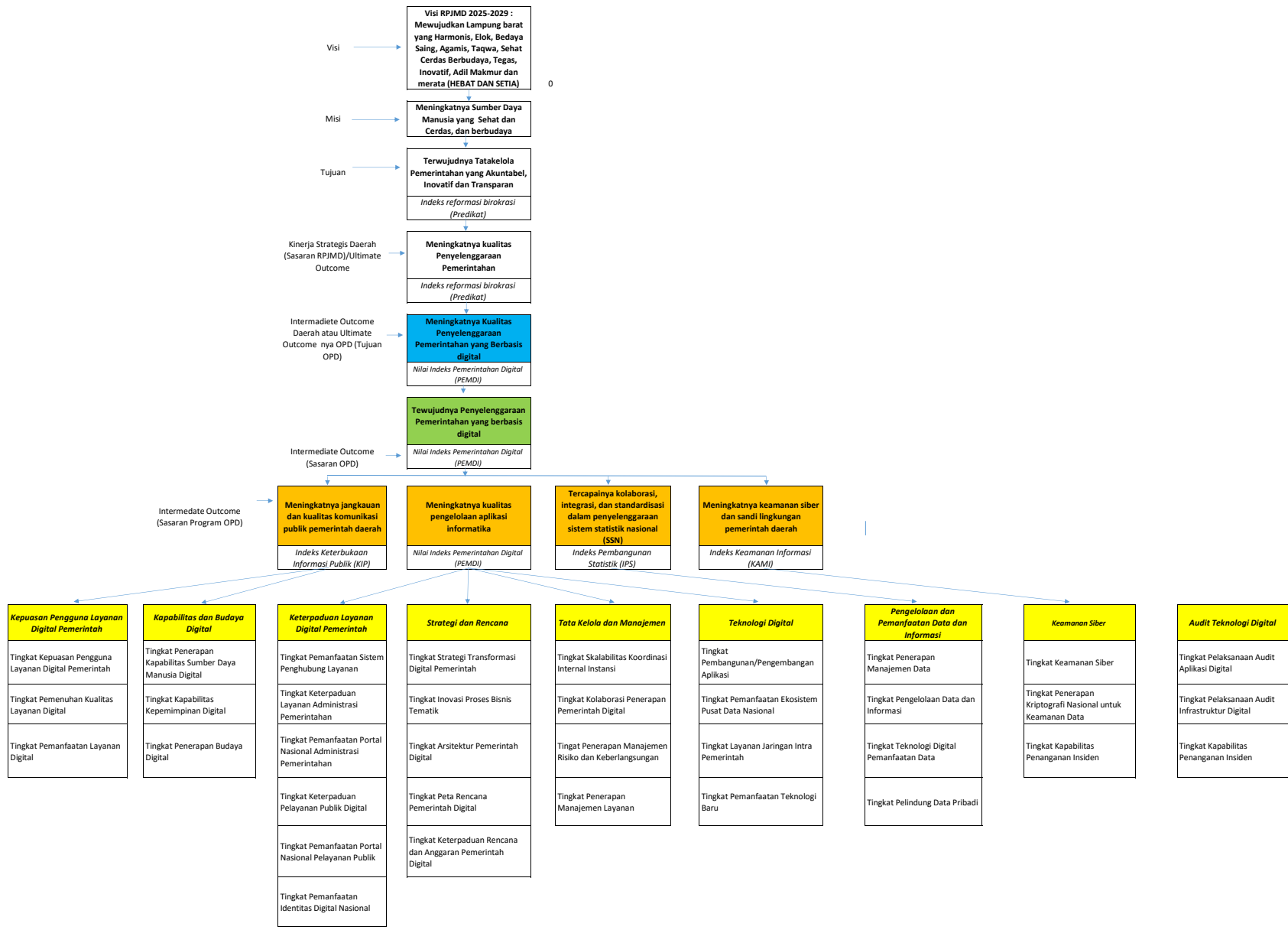
PENUTUP

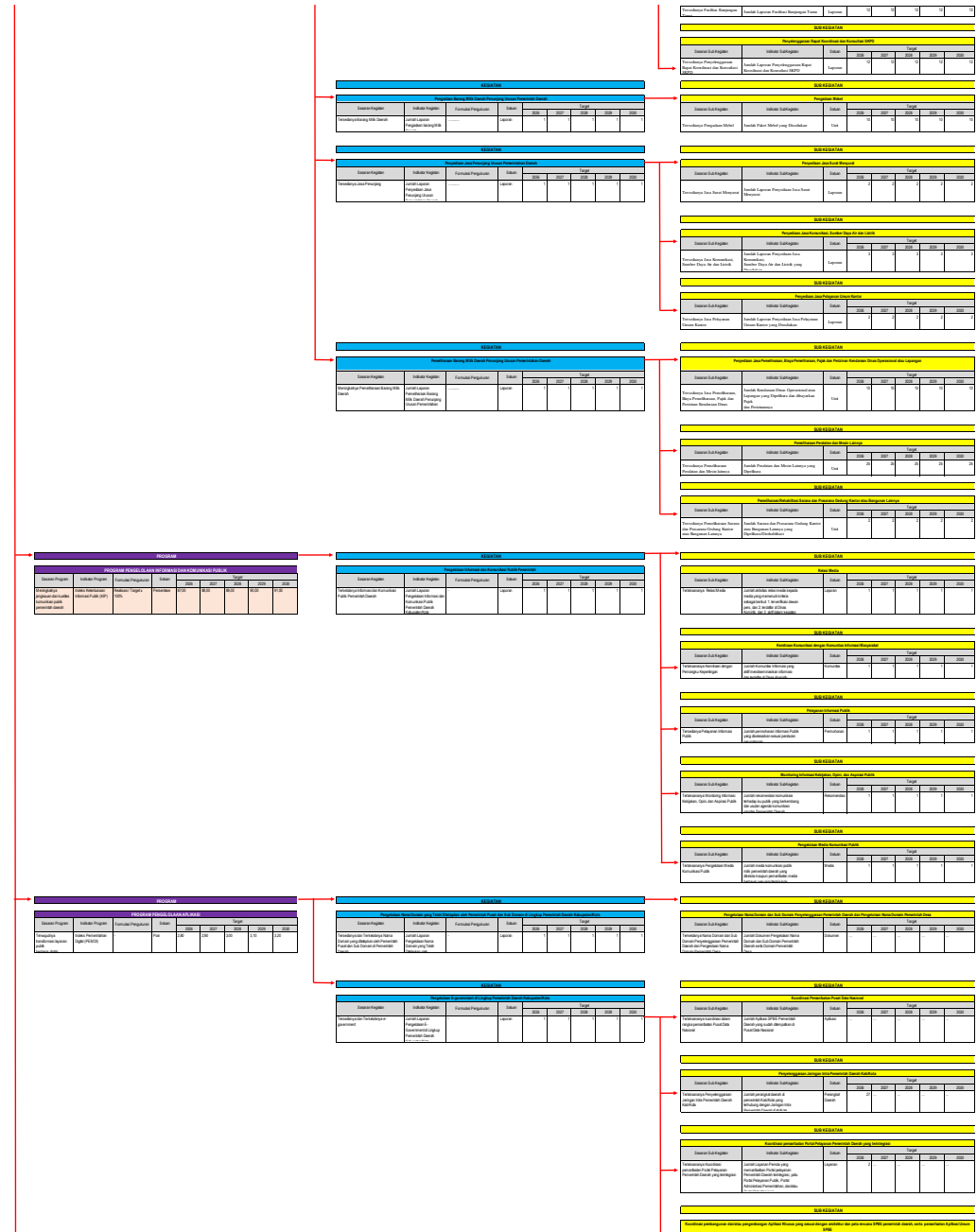
Dokumen renstra merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Untuk mewujudkannya, dibutuhkan peran aktif para stakeholder sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan perangkat daerah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lampung Barat,

Burlianto Eka Putra, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP 197109241998031005







**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN			
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				9.201.598.210,00		10.213.663.031,00		11.235.029.335,00		12.358.532.270,00		13.594.385.497,00					
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.692.898.266,00		4.130.388.093,00		4.543.426.903,00		4.997.769.594,00		5.497.546.554,00					
Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82.50	82.70	3.692.898.266,00	82.80	4.130.388.093,00	82.90	4.543.426.903,00	83.00	4.997.769.594,00	83.10	5.497.546.554,00	2.16.2.20.2.21.13.00 00 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				54.133.400,00		59.546.740,00		65.501.414,00		72.051.557,00		79.256.712,00					
Meningkatnya Kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	54.133.400,00	1	59.546.740,00	1	65.501.414,00	1	72.051.557,00	1	79.256.712,00					
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1		1		1		1		1		1	1	1		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1		1		1		1		1		1	1	1		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1		1		1		1		1		1	1	1		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1		1		1		1		1		1	1	1		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12		12		12		12		12		12	12	12		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	8		8		8		8		8		8	8	8		
2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				23.214.700,00		25.536.170,00		28.089.787,00		30.898.766,00		33.988.642,00					
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	8	23.214.700,00	8	25.536.170,00	8	28.089.787,00	8	30.898.766,00	8	33.988.642,00					
2.16.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6.045.500,00		6.650.050,00		7.315.055,00		8.046.561,00		8.851.217,00					
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	6.045.500,00	1	6.650.050,00	1	7.315.055,00	1	8.046.561,00	1	8.851.217,00					
2.16.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4.789.300,00		5.268.230,00		5.795.053,00		6.374.558,00		7.012.014,00					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	4.789.300,00	1	5.268.230,00	1	5.795.053,00	1	6.374.558,00	1	7.012.014,00		
2.16.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.222.500,00		5.744.750,00		6.319.225,00		6.951.148,00		7.646.262,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	5.222.500,00	1	5.744.750,00	1	6.319.225,00	1	6.951.148,00	1	7.646.262,00		
2.16.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				4.756.500,00		5.232.150,00		5.755.365,00		6.330.902,00		6.963.992,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	4.756.500,00	1	5.232.150,00	1	5.755.365,00	1	6.330.902,00	1	6.963.992,00		
2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.105.000,00		2.315.500,00		2.547.050,00		2.801.755,00		3.081.931,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	2.105.000,00	1	2.315.500,00	1	2.547.050,00	1	2.801.755,00	1	3.081.931,00		
2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.999.900,00		8.799.890,00		9.679.879,00		10.647.867,00		11.712.654,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12	7.999.900,00	12	8.799.890,00	12	9.679.879,00	12	10.647.867,00	12	11.712.654,00		
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.713.653.546,00		2.985.018.901,00		3.283.520.791,00		3.611.872.870,00		3.973.060.157,00		
Meningkatnya Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	2.713.653.546,00	1	2.985.018.901,00	1	3.283.520.791,00	1	3.611.872.870,00	1	3.973.060.157,00		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	29		29		29		29		29			
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.706.818.546,00		2.977.500.401,00		3.275.250.441,00		3.602.775.485,00		3.963.053.033,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	29	2.706.818.546,00	29	2.977.500.401,00	29	3.275.250.441,00	29	3.602.775.485,00	29	3.963.053.033,00		
2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.500.000,00		2.750.000,00		3.025.000,00		3.327.500,00		3.660.250,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	2.500.000,00	1	2.750.000,00	1	3.025.000,00	1	3.327.500,00	1	3.660.250,00		
2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.030.000,00		2.233.000,00		2.456.300,00		2.701.930,00		2.972.123,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12		12		12		12		12			
2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.658.000,00		5.123.800,00		5.636.180,00		6.199.798,00		6.819.778,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	1	4.658.000,00	1	5.123.800,00	1	5.636.180,00	1	6.199.798,00	1	6.819.778,00		
2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				248.498.360,00		273.348.196,00		300.683.016,00		330.751.317,00		363.826.449,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	2	248.498.360,00	2	273.348.196,00	2	300.683.016,00	2	330.751.317,00	2	363.826.449,00		
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				31.714.000,00		34.885.400,00		38.373.940,00		42.211.334,00		46.432.467,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	6	31.714.000,00	6	34.885.400,00	6	38.373.940,00	6	42.211.334,00	6	46.432.467,00		
2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.060.000,00		3.366.000,00		3.702.600,00		4.072.860,00		4.480.146,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3	2	3.060.000,00	2	3.366.000,00	2	3.702.600,00	2	4.072.860,00	2	4.480.146,00		
2.16.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				12.064.800,00		13.271.280,00		14.598.408,00		16.058.249,00		17.664.074,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	12.064.800,00	12	13.271.280,00	12	14.598.408,00	12	16.058.249,00	12	17.664.074,00		
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				171.875.000,00		189.062.500,00		207.968.750,00		228.765.625,00		251.642.188,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	171.875.000,00	12	189.062.500,00	12	207.968.750,00	12	228.765.625,00	12	251.642.188,00		
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.950.000,00		111.045.000,00		122.149.500,00		134.364.450,00		147.800.895,00		
Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	10	100.950.000,00	10	111.045.000,00	10	122.149.500,00	10	134.364.450,00	10	147.800.895,00		
2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				100.950.000,00		111.045.000,00		122.149.500,00		134.364.450,00		147.800.895,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	10	100.950.000,00	10	111.045.000,00	10	122.149.500,00	10	134.364.450,00	10	147.800.895,00		
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				67.476.000,00		74.223.600,00		81.645.960,00		89.810.556,00		98.791.612,00		
Tersedianya Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	67.476.000,00	3	74.223.600,00	3	81.645.960,00	3	89.810.556,00	3	98.791.612,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2		2		2		2		2			
2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.295.000,00		3.624.500,00		3.986.950,00		4.385.645,00		4.824.210,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2	3.295.000,00	2	3.624.500,00	2	3.986.950,00	2	4.385.645,00	2	4.824.210,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				23.800.000,00		26.180.000,00		28.798.000,00		31.677.800,00		34.845.580,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	23.800.000,00	3	26.180.000,00	3	28.798.000,00	3	31.677.800,00	3	34.845.580,00		
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				40.381.000,00		44.419.100,00		48.861.010,00		53.747.111,00		59.121.822,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	2	40.381.000,00	2	44.419.100,00	2	48.861.010,00	2	53.747.111,00	2	59.121.822,00		
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				276.008.560,00		303.609.416,00		333.970.358,00		367.367.393,00		404.104.133,00		
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	276.008.560,00	2	303.609.416,00	2	333.970.358,00	2	367.367.393,00	2	404.104.133,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	25		25		25		25					
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	10		10		10		10					
2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				232.200.000,00		255.420.000,00		280.962.000,00		309.058.200,00		339.964.020,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	10	232.200.000,00	10	255.420.000,00	10	280.962.000,00	10	309.058.200,00	10	339.964.020,00		
2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.318.560,00		33.350.416,00		36.685.458,00		40.354.003,00		44.389.404,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	25	30.318.560,00	25	33.350.416,00	25	36.685.458,00	25	40.354.003,00	25	44.389.404,00		
2.16.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.490.000,00		14.839.000,00		16.322.900,00		17.955.190,00		19.750.709,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	13.490.000,00	2	14.839.000,00	2	16.322.900,00	2	17.955.190,00	2	19.750.709,00		
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				3.406.688.200,00		3.747.357.020,00		4.122.092.722,00		4.534.301.994,00		4.987.732.194,00		
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Indeks KIP	85.70	87.00	3.406.688.200,00	88.00	3.747.357.020,00	89.00	4.122.092.722,00	90.00	4.534.301.994,00	91.00	4.987.732.194,00	2.16.2.20.2.21.13.00 00 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3.406.688.200,00		3.747.357.020,00		4.122.092.722,00		4.534.301.994,00		4.987.732.194,00		
Terkelolanya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1	1	3.406.688.200,00	1	3.747.357.020,00	1	4.122.092.722,00	1	4.534.301.994,00	1	4.987.732.194,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	10	1		1		1		1		1			
	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1	1		1		1		1		1			
2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media				2.678.836.400,00		2.946.720.040,00		3.241.392.044,00		3.565.531.248,00		3.922.084.373,00		
Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1	1	2.678.836.400,00	1	2.946.720.040,00	1	3.241.392.044,00	1	3.565.531.248,00	1	3.922.084.373,00		
2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				106.000.000,00		116.600.000,00		128.260.000,00		141.086.000,00		155.194.600,00		
Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	10	1	106.000.000,00	1	116.600.000,00	1	128.260.000,00	1	141.086.000,00	1	155.194.600,00		
2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik				446.443.800,00		491.088.180,00		540.196.998,00		594.216.698,00		653.638.368,00		
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1	1	446.443.800,00	1	491.088.180,00	1	540.196.998,00	1	594.216.698,00	1	653.638.368,00		
2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				84.377.000,00		92.814.700,00		102.096.170,00		112.305.787,00		123.536.366,00		
Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1	1	84.377.000,00	1	92.814.700,00	1	102.096.170,00	1	112.305.787,00	1	123.536.366,00		
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik				91.031.000,00		100.134.100,00		110.147.510,00		121.162.261,00		133.278.487,00		
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1	1	91.031.000,00	1	100.134.100,00	1	110.147.510,00	1	121.162.261,00	1	133.278.487,00		
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				2.102.011.744,00		2.335.917.918,00		2.569.509.710,00		2.826.460.682,00		3.109.106.749,00		
Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks PEMDI	2.62	1.35	2.102.011.744,00	1.40	2.335.917.918,00	1.45	2.569.509.710,00	1.50	2.826.460.682,00	1.55	3.109.106.749,00	2.16.2.20.2.21.13.00 - Dinas Komunikasi dan Informatika	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				-		23.705.000,00		26.075.500,00		28.683.050,00		31.551.355,00		
Tersedianya dan Terkelolanya Nama Domain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1	1	-	1	23.705.000,00	1	26.075.500,00	1	28.683.050,00	1	31.551.355,00		
2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa				-		23.705.000,00		26.075.500,00		28.683.050,00		31.551.355,00		
Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1	1	-	1	23.705.000,00	1	26.075.500,00	1	28.683.050,00	1	31.551.355,00		
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2.102.011.744,00		2.312.212.918,00		2.543.434.210,00		2.797.777.632,00		3.077.555.394,00		
Tersedianya dan Terkelolanya e-government	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	2	2	2.102.011.744,00	2	2.312.212.918,00	2	2.543.434.210,00	2	2.797.777.632,00	2	3.077.555.394,00		
	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	27	27		27		27		27		27			
	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	27	27		27		27		27		27			
	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	1	1		1		1		1		1			
2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional				27.847.000,00		30.631.700,00		33.694.870,00		37.064.357,00		40.770.793,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	2	2	27.847.000,00	2	30.631.700,00	2	33.694.870,00	2	37.064.357,00	2	40.770.793,00		
2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				233.234.000,00		256.557.400,00		282.213.140,00		310.434.454,00		341.477.899,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	27	27	233.234.000,00	27	256.557.400,00	27	282.213.140,00	27	310.434.454,00	27	341.477.899,00		
2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi				350.788.000,00		385.866.800,00		424.453.480,00		466.898.828,00		513.588.711,00		
Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	2	2	350.788.000,00	2	385.866.800,00	2	424.453.480,00	2	466.898.828,00	2	513.588.711,00		
2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE				349.314.000,00		384.245.400,00		422.669.940,00		464.936.934,00		511.430.627,00		
Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	1	1	349.314.000,00	1	384.245.400,00	1	422.669.940,00	1	464.936.934,00	1	511.430.627,00		
2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan				30.844.000,00		33.928.400,00		37.321.240,00		41.053.364,00		45.158.700,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2	2	30.844.000,00	2	33.928.400,00	2	37.321.240,00	2	41.053.364,00	2	45.158.700,00		
2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet				615.373.244,00		676.910.568,00		744.601.625,00		819.061.788,00		900.967.967,00		
Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	27	27	615.373.244,00	27	676.910.568,00	27	744.601.625,00	27	819.061.788,00	27	900.967.967,00		
2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				90.404.000,00		99.444.400,00		109.388.840,00		120.327.724,00		132.360.496,00		
Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	2	2	90.404.000,00	2	99.444.400,00	2	109.388.840,00	2	120.327.724,00	2	132.360.496,00		
2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas				404.207.500,00		444.628.250,00		489.091.075,00		538.000.183,00		591.800.201,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1	1	404.207.500,00	1	444.628.250,00	1	489.091.075,00	1	538.000.183,00	1	591.800.201,00		
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				238.001.000,00		272.801.100,00		300.081.210,00		330.089.331,00		363.098.264,00		
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				238.001.000,00		272.801.100,00		300.081.210,00		330.089.331,00		363.098.264,00		
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.46	2.80	238.001.000,00	3.00	272.801.100,00	3.20	300.081.210,00	3.40	330.089.331,00	3.60	363.098.264,00	2.16.2.20.2.21.13.00 00 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				238.001.000,00		272.801.100,00		300.081.210,00		330.089.331,00		363.098.264,00		
Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Kab. Lampung Barat	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	30	30	238.001.000,00	30	272.801.100,00	30	300.081.210,00	30	330.089.331,00	30	363.098.264,00		
	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	2	2		2		2		2		2			
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	85	87		89		91		93		95			
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	60	60		62		64		67		70			
2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia				115.000.000,00		126.500.000,00		139.150.000,00		153.065.000,00		168.371.500,00		
Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	60	60	115.000.000,00	62	126.500.000,00	64	139.150.000,00	67	153.065.000,00	70	168.371.500,00		
2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral				101.287.000,00		111.415.700,00		122.557.270,00		134.812.997,00		148.294.297,00		
Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	85	87	101.287.000,00	89	111.415.700,00	91	122.557.270,00	93	134.812.997,00	95	148.294.297,00		
2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				21.714.000,00		23.885.400,00		26.273.940,00		28.901.334,00		31.791.467,00		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	30	30	21.714.000,00	30	23.885.400,00	30	26.273.940,00	30	28.901.334,00	30	31.791.467,00		
2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral				-		11.000.000,00		12.100.000,00		13.310.000,00		14.641.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	2	2	-	2	11.000.000,00	2	12.100.000,00	2	13.310.000,00	2	14.641.000,00		
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				410.759.000,00		451.834.900,00		497.018.390,00		546.720.229,00		601.392.252,00		
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				410.759.000,00		451.834.900,00		497.018.390,00		546.720.229,00		601.392.252,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Indeks KAMI	1.00	2.00	410.759.000,00	2.50	451.834.900,00	3.00	497.018.390,00	3.50	546.720.229,00	4.00	601.392.252,00	2.16.2.20.2.21.13.00 00 - Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				410.759.000,00		451.834.900,00		497.018.390,00		546.720.229,00		601.392.252,00			
Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6	3	410.759.000,00	3	451.834.900,00	3	497.018.390,00	3	546.720.229,00	3	601.392.252,00			
	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	15	7		7		7		7		7				
	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	2	2		2		2		2		2				
Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	15	1	1		1		1		1						
2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				212.000.000,00		233.200.000,00		256.520.000,00		282.172.000,00		310.389.200,00			
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6	3	212.000.000,00	3	233.200.000,00	3	256.520.000,00	3	282.172.000,00	3	310.389.200,00			
2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				57.180.000,00		62.898.000,00		69.187.800,00		76.106.580,00		83.717.238,00			
Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	15	1	57.180.000,00	1	62.898.000,00	1	69.187.800,00	1	76.106.580,00	1	83.717.238,00			
2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				80.000.000,00		88.000.000,00		96.800.000,00		106.480.000,00		117.128.000,00			
Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	15	7	80.000.000,00	7	88.000.000,00	7	96.800.000,00	7	106.480.000,00	7	117.128.000,00			
2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				61.579.000,00		67.736.900,00		74.510.590,00		81.961.649,00		90.157.814,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	2	2	61.579.000,00	2	67.736.900,00	2	74.510.590,00	2	81.961.649,00	2	90.157.814,00		